VIICE 39. IT



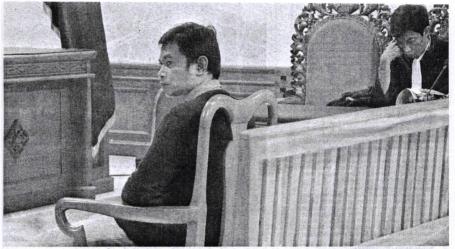
Diperiksa, Terdakwa Sebut Nama **Bupati hingga Kapolres**

DENPASAR, NusaBali Anggota DPRD Jembrana, I Made Sueca Antara yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menjalani pemeriksaan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (9/9). Dalam sidang, Sueca sempat menyebut beberapa nama pejabat Pemkab Jembrana yang sempat dimintai tolong untuk menyelesaikan kasusnya

Hal ini terungkap saat majelis hakim menanyakan terkait pertemuan Sueca dengan Kadis Perindagkop Jembrana, Ni Made Ayu Ardini yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini di salah satu rumah makan. Dalam pertemuan tersebut, Sueca mengaku sempat diminta Kadisperindagkop untuk menyelesaikan kasus ini dengan meminta tolong kepada Kapolres Jembrana saat itu, AKBP Komang Sandi Arsana. "Ya. Memang sempat ada permintaan itu," ujar Sueca.

Namun Sueca mengatakan tidak mendapat bantuan apapun dari Kapolres Jembrana saat itu. Termasuk saat dirinya minta tolong kepada Bupati Jembrana, Putu Artha. "Saya juga sempat mi-nta tolong Bupati. Tapi dijawab jalani saja, ini nasib kamu," ujar politisi PDIP ini.

Dalam keterangannya, Sueca juga kembali menyebut Ami Santosa sebagai pemilik UD Sumber Maju yang mendapat rekomendasi pembelian BBM



TERDAKWA, I Made Sueca Antara, anggota DPRD Jembrana saat jalani persid

Hakim juga sempat menanyakan soal dua pegawai UD Sumber Maju yang sempat menjalani sidang pidana dan dihukum percobaan karena membeli BBM subsidi dengan menggunakan rekomendasi yang sudah tidak berlaku. "Kami pernah tanya

bersubsidi. Ia mengatakan se benarnya usaha tersebut milik ayahnya yang bekerjasama dengan Ami, namun diatasnamakan dirinya. "Saya hanya punya tanahnya saja. Sementara mesin dan pengelolaan semua di bawah kendali Ami," jelasnya.

tidak, kenapa anak buah kamu disidang pidana sementara kamu disidang kasus korupsi," tanya hakim. Sueca mengatakan sempat beberapa kali mencoba menanyakan kasus ini kepada Kajari Iembrana melalui telpon tapi tidak pernah diangkat.

'Saya sempat datang ke Kejari Jembrana untuk ketemu Kajari tapi tidak diperbolehkan satpam," lanjutnya. Usai pemeriksaan terdakwa, majelis hakim akan melanjutkan sidang pada, Rabu (16/9) nanti dengan agenda pembacaan tuntutan. 🖮 rez

: Kamis, 10 September 2015 Edisi

Hal

Nussissif



Distribusi Beras Sehat Ngadat

Setiap bulan,
Pemkab Tabanan
beli beras organik
sebanyak 15 ton
yang dananya
bersumber dari
APBD Tahun 2015
sebesar Rp 24 miliar.

TABANAN, NusaBali

Sejumlah PNS di lingkungan Pemkab Tabahan pakrimik karena distribusi beras sehat sejak tiga bulan ngadat. Ironisnya, distribusi beras sehat yang tak lancar dialami penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang mendampingi petani produksi beras organik tersebut. Informasi di lapangan, nga-

datnya beras sehat terjadi di tiga instansi, salah satunya di Badan Pelaksana Penyuluh (Bapeluh) Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Tabanan. Sumber di lapangan mengatakan, para PPL yang bertugas di unit pelaksana teknis dinas (UPTD) di 10 kecamatan belum kebagian jatah beras sehat. "Sudah tiga bulan ini belum dapat beras sehat," ungkap sumber di lapangan, Rabu (9/9). Padahal beras sehat tersebut dinantikan setiap bulannya untuk pemenuhan pangan di rumah tangga.

Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Holtikultura Tabanan, Nyoman Budana menyebutkan distribusi beras sehat merupakan tugas dari Badan Penyuluh. "Bukan tugas kami, coba konfirmasi ke Bapeluh. Ada petugas yang menangani khusus beras sehat,"

ungkap Budana. Ia mengaku tidak tahu jika selama tiga bulan ini distribusi beras sehat tidak lancar ke PNS yang wajib menerimanya.

Kepala Bapeluh Nyoman Suna-rta membantah jika distribusi beras sehat ngadat selama tiga bulan. 'Tak ada beras ngadat untuk kami di Bapeluh. Tidak benar itu, hanya bulan September yang belum kami terima," tandas Sunarta. Ia menjelaskan, bukan Bapeluh yang punya tugas distribusikan beras sehat seperti yang disampaikan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Holtikultura Tabanan. Bapeluh hanya bertugas di tingkat budidaya. "Distribusi beras sehat bukan tugas Bapeluh, kami hanya ada di tingkat budidaya. Sebaiknya bapak tanyakan ke Pemkab, karena ini bukan bidang kami," aku Sunarta

Sayang, Kepala Bappeda Tabanan, Ida Bagus Wiratmaja sebagai perancang program unggulan beras sehat belum bisa dikonfirmasi. Beras sehat dianggarkan di APBD tahun 2015 sebesar Rp 24 miliar untuk beli beras produksi petani di Tabanan. Dana sebesar itu digelontorkan untuk sejumlah subak binaan yang tanam padi secara organik. Beras organik itu setiap bulannya dibeli sebanyak 15 ton untuk dibagikan kepada seluruh pegawai di Pemkab Tabanan.

Sebelumnya Wiratmaja mengatakan, konsumsi beras organik atau beras sehat telah dimulai sejak bulan Juli 2014. Hanya saja, jumlah beras masih terbatas dan dikonsumsi oleh sejumlah SKPD. Gerakan terbatas di tahun 2014 itu untuk menampung hasil panen dari percontohan beras sehat seluas 45 hektare. "Program kon-

sumsi beras sehat di tahun 2015 menyasar seluruh pegawai di Tabanan. Tahun 2014 bentuk uji coba untuk menampung beras petani binaan di lahan seluas 45 hektare," terang Wiratmaja, Senin (1/9/2014).

Diterangkan, beras sehat ini dihasilkan dari sistem pertanian organik yang sepenuhnya memanfaatkan bahan-bahan alami, tanpa kimia sintesis. "Tahap awal petani dibantu saprodi pupuk organik, bibit, pengolahan tanah, biaya tanam dan sebagainya. Hasil panennya dibeli oleh Mitra Usaha yang memiliki sertifikasi organik dengan harga jauh di atas harga pasar melalui kesepakatan, tahun ini disepakati harga Rp 5.200 per kilogram gabah kering panen," ujar birokrat asal Geria Cau Belayu, Kecamatan Marga ini. 📾 k21

Edisi : Kamis, 16 September 2015

Hal : _______

Nusaran Balf



Kasus Korupsi Bansos UPPO Bangli Sidang Perdana

★ Terdakwa Ketua Kelompok Tani Ternak Bina Winangun

DENPASAR, NusaBali

Kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) dengan terdakwa Ketua Kelompok Tani Ternak Bina Winangun, Desa Batur Tengah, Kintamani, Bangli, Nyoman Juniada mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (8/9). Dalam kasus ini terdakwa diduga menyelewengkan bantuan pemerintah hingga mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 340 juta.

Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim pimpinan Beslin Sihombing, Jaksa Penuntut Umum (JPU), I Bagus PG Agung dalam dakwaan menyatakan kasus ini berawal saat terdakwa yang menjadi Ketua Kelompok Tani Ternak Bina Winangun digelontor bantuan unit pengolahan pupuk organik pada 2012 lalu.

"Bantuan bersumber dari Kementerian Pertanian melalui Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian," jelas Agung dalam dakwaan. Dana tersebut langsung dikeluarkan oleh pusat kepada kelompok tani dan telah disetujui oleh Dinas P3 Bangli. Sesuai petunjuk teknis bantuan senilai Rp 340 juta dipergunakan untuk kegiatan pe

ngadaan sepeda motor roda tiga, kandang koloni, bak permentasi, rumah kompos dan 35 ekor sapi. Tetapi dalam pengelolaannya, dana tersebut ternyata disalahgunakan oleh yang bersangkutan alias melenceng dari rencana usulan kegiatan kelompok (RUKK).

Salah satunya penggunaan uang Rp 187.439.600 yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh terdakwa sebagai ketua kelompok tani. Dari hasil audit yang dilakukan BPKP wilayah Bali, ditemukan kerugian negara Rp 340 juta yang diakibatkan perbuatan terdakwa. Atas perbuatannya, jaksa menjerat terdakwa dengan pasal 2 jo pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor, sebagaimana yang telah ditambah dan diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang tipikor sebagai dakwaan primair dan pasal 3 UU yang sama sebagai dakwaan subsidair.

Usai pembacaan dakwaan, kuasa hukum terdakwa, Made Suardika menyatakan tidak akan menyampaikan eksepsi (keberatan atas dakwaan) sehingga majelis hakim akan melanjutkan sidang pada pekan mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi. Fez

Edisi : Kamis, 10 September 2015

Hal : 5

NTSP 39 F



Keberatan Upah Pungut Pajak Mentok

★ Pusat Malah Minta Petugas

Dimaksimalkan

Petugas pungut terbawah keberatan lantaran upah yang diterima tak sebanding dengan biaya pembuatan rekening. Namun pusat menolak keberatan itu.

SINGARAJA, NusaBali

Keberatan atas pembayaran upah pungut pajak bumi dan bangunan (UP PBB) melalui rekening pribadi masing-masing petugas pungut, tidak mendapat respons dari pemerintah pusat. Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabu-

aten Buleleng bersama Forum Komunikasi Perbekel (Forkomkel) Buleleng yang langsung menemui Kemendagri justru diminta memaksimalkan petugas pungut.

"Sebenarnya kami sudah tahu akan hasilnya, tapi kami ajak Forkom Perbekel dan Camat berkonsultasi ke Kemendagri agar mendapat penjelasan yang pasti, sehingga jangan sampai kami yang dibilang mengada-ada," terang Kepala Dispeda Buleleng Ida Bagus Puja Erawan yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (8/9) pagi.

Keberatan petugas pungut terbawah lantaran jumlah UP yang diterima tidak sebanding dengan pembuatan rekening. Dalam pembukaan rekning, minimal saldo awal sebesar Rp 100 ribu, sedangkan UP yang diterima dibawah Rp 100 ribu setiap tahun. Akibatnya, __UP telah diatur melalui PP yang petugas terbawah belakangan ini artinya berlaku di seluruh Indomulai tidak peduli dengan tang-nesia. "Kami diminta membuat 100 ribu setiap tahun. Akibatnya,

gungjawabnya sebagai penyebar SPPT termasuk petugas pungut.

Kadispenda Puja Erawan menjelaskan, pembagian UP PBB kepada petugas pungut diatur melalui PP nomor 69 tahun 2010 tentang insentif PBB terhadap instansi pelaksana. Dalam aturan itu disebutkan, prosentase pem-bagian UP PBB dimana 5 persen dari total pungutan diberikan kepada Kepala Daerah, Wakilnya Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan instasi yang melaksanakan dalam hal ini Dispenda.

Untuk petugas dibawahnya seperti camat, perbekel, lurah dari kepala dusun dan kepala lingkungan, UP-nya diambilkan dari bagian Dispenda. UP ini biasanya dibagikan setelah akhir tahun yang diperkirakan hanya berkisar Rp 31 juta untuk setiap kecamatan yang harus dibagi lagi dengan seluruh petugas yang ada

di desa dan kelurahan.

'Makanya kalau tidak salah ada yang dapat hanya Rp 7.500. Sekarang kalau dapat sebesar itu terus harus membuat rekening, ya kami bisa memyangkan itu pasti sulit diwujudkan. Makanya kami ajak konsultasi ke Kemendagri terkait dengan itu, dan hasilnya yang kami diminta tetap memaksimalkan mereka,"

Menurut Puja Erawan, dalam konsultasinya ke Kemendagri belum lama ini, pihaknya diterima oleh Biro Hukum dari Kemendagri. Dari pertemuan itu, pihaknya justru diminta me-maksimalkan para pegugas itu dengan membuka kegiatan yang bisa menambah penghasilan mereka. Masalahnya, pembagian kebijakan yang bisa menambah penghasilan para petugas pungut, sehingga mereka ini tetap bisa sebagai petugas pungut," imbuhnya.

Untuk memaksimalkan para petugas tersebut, Dispenda kata Puja Erawan tengah merancang dua program yang akan melibat-kan para petugas pungut tersebut. Program itu berupa validasi data wajib PBB dan penagih piutang. Kedua program itu diharapkan dapat memperbaiki data base wajib pajak dan bisa mengurangi piutang yang ada.

Sebelumnya, aparat desa keberatan dengan pembayaran UP lewat rekening. Masalahnya jumlah UP yang diterima tidak sebanding dengan biaya pembukaan rekning. Kebijakan itu berlaku mulai tahun 2015, karena semula pembayaran dilakukan secara langsung. Akibatnya, pembahyaran UP itu pun

Edisi

: Kamis, 10 September 2015

Hal

USSIBSIB



Pabrik Beton Cor Akhirnya Ajukan Izin Prinsip

SINGARAJA, NusaBali Kisruh soal keberadaan pabrik pencampuran material beton cor tanpa izin di Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, akhirnya menemui titik terang. Pabrik ini sudah mengajukan izin prinsip setelah sebelumnya mendapat protes keras dari Lembaga DPRD Buleleng. Tim investasi pun pastikan dokumen permohonan itu tidak melanggar ketentuan.

Rencananya tim investasi akan survei lapangan sekaligus mengecek kebenaran dokumen permohonan izin prinsip yang diajukan pihak perusahaan, Kamis (10/9) hari ini. Dalam waktu seminggu, tim investasi sudah harus memberi kajian kepada Bupati untuk memastikan dapat tidaknya izin prinsip yang dimohon.

Besok (Kamis hari ini,red) kita jadwalkan survey lokasi dan meneliti berkas yang diajukan dalam permohonan izin prinsip itu," terang Sekretaris Tim Investasi Pemkab Bulelen yang juga Kabag Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Setkab Buleleng, I Ketut Suparto, Rabu (9/9) pagi.

Dikatakan, sejaun ini dokumen permohonan izin prinsip dari pihak perusahaan pencampuran beton cor di Desa Bungkulan telah lengkap. Dokumen itu diantaranya persetujuan penyanding di lokasi pabrik dan dukungan dari pihak desa dinas maupun adat atas kehadiran perusahaan tersebut.

Dari dokumen permohonan itu, tim investasi memiliki kewajiban memastikan kebenaran

dari dokumen tersebut dengan survei lapangan. Dari hasil survei lapangan dan mengecek kebenaran dokumen, tim investasi akan susun kajian yang akan menjadi dasar pertimbangan dalam keputusan izin prinsip diberikan atau tidak oleh Bupati.

"Kami hanya melaporkan berkas lengkap, dan kami juga berikan kajian. Soal diberikan izin prinsip atau tidak, itu semua kewenangan dari pak Bupati," jelas Suparto. Disinggung soal Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten di kawasan Desa Bungkulan, Suparto menyatakan, kawasan Desa Bungkulan masih masuk dalam kawasan campuran. Sehingga pabrik pencampuran beton cor tersebut masih dimungkinkan berada di kawasan Desa Bungkulan.

Selain itu, pencampuran be-ton cor itu bukanlah sebuah industry melainkan hanya sebatas mencampur bahan yang sudah ada. "Desa Bungkulan itu masih masuk kawasan campuran, nanti setelah ada Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) baru akan diatur zone-zonenya. Dan saya kira, usaha itu bukan industry karena sebatas mencampur bahan-bahan menjadi beton cor," jelas Suparto.

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Buleleng I Ketut Susila dan I Made Adi Purnawijaya menyoroti keras keberadaan pabrik pencampuran beton cor tanpa izin di Desa Bungkulan tersebut, Pabrik itu juga melanggar Perda RTRW karena kawasan Desa Bungkulan masuk kawasan pengembangan pariwisata. **** k19**

Edisi : Kamis 10 September 2015 Hal

Nusar Balf



Pemprov Bantu Bedah Rumah Warga Desa Bengkala

SINGARAJA, NusaBali

Pemerintah Provinsi (Pem-prov) Bali kembali membantu warga kurang mampu dengan program bedah rumah. Kali ini, bantuan bedah rumah senilai Rp 30 juta itu diberikan kepada keluarga I Made Pasi Dodo, 47 warga Banjar Dinas Kajanan, Desa Bengkala, Kecamatan Kubutambahan.

Wakil Gubernur (Wagub)
Bali, I Ketut Sudikerta yang
meninjau pembangunan rumah
tersebut, Rabu (9/9) sore, ikut
terlibat menjadi tukang terap (pasang batako). Kunjungan Wagub dan rombongan diterima Camat Kubutambahan Komang Sumerta dan Perbekel Desa Bengkela, I Made Artana

di lokasi pembangunan rumah bagi keluarga I Made Pasi Dodo. Semula keluarga ini sama sekali tidak memiliki tempat tinggal. Sejak remaja, Dodo pilih merantau ke Denpasar

sebagai pekerja serabutan. Di Kota Denpasar juga Dodo mendapatkan pasangan hidup bernama Luh Ariani, 40. Setelah cukup lama merantau, mereka pulang ke kampungnya ke Desa Bengkala, karena bekerja serabutan di Denpasar juga tidak bisa memberi harapan hidup

yang layak. Namun di kampung, ternyata mereka tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Ia bersama istri dan kedua anaknya terpaksa tinggal serumah dengan saudara-sudaranya. Rumah itupun hanya terdiri dari beberapa kamar saja bekas rumah orang tuannya dulu.

Melihat kondisinya seperti itu, pihak desa kemudian mengusulkan bantuan bedah rumah kepada Pemprov Bali. Usulan itu pun mendapat respon, hingga



WAGUB Sudikerta (tengah bertopi) serahkan bantuan bedah rumah dan bibit kucit, kemarin.

akhirnya Pemprov Bali memberikan bantuan bedah rumah. "Kami merasa senang sekali, saya sampaikan terima kasih banyak kepada pak Ketut Sudikerta. Karena beliau sekarang saya punya rumah, kalau membangun sendiri, jelas tidak bisa, karena makan saja susah," tuturnya dalam bahasa Bali.

Perbekel Desa Bengkala I Made Artana mengatakan, di desanya ter-catat ada 45 KK kurang mampu. Dari jumlah itu, 4 KK telah dibantu bedah rumah dari Dinas Sosial Pemprov Bali, kemudian 6 KK dibantu oleh pihak ketiga dan satu lagi dibantu Pemprov Bali langsung. "Kami usulkan berdasarkan skala prioritas, kami lihat keluarga Pasi Dodo ini cukup memprihatinkan, sehingga lebih awal diusulkan," jelasnya. Menurut Artana, bedah rumah

sangat membantu warga yang kurang mampu dan pemerintah desa. Karena, dana dari desa tidak akan berkurang kalau harus membantu warga yang kurang mampu. Dana desa itu bisa dialihkan untuk program lainnya. Disamping itu, program itu juga lebih mendekatkan pemimpin dengan warganya. "Selama ini kan warganya hanya tahu perbekelnya, tapi dengan program ini, warga juga akan mengetahui siapa gubernur dan wakil gebernur dan

wakil gubernurnya," ujarnya. Sementara Wagub Sudikerta menyatakan, Pemprov Bali memberikan bantuan kepada warga miskin dalam berbagai bentuk. Pertama bantuan yang diberikan berupa bedah rumah, kemudian untuk penguatan ekonomi kerayatan, warga kurang mampu juga diberikan batuan berupa ternak babi dari Bank Pembangunan Bali (BPD)

Cabang Singaraja. Selain itu, Wagub Sudikerta juga serahkan bantuan paket sembako dan buku tulis kepada anak dari keluarga

kurang mampu. "Sekarang Pemprov Bali sudah membantu tempat tinggal, jadi warga yang dibantu tidak lagi memikirkan harus tinggal dimana." jelasnya. Sementara Bank BPD Bali dalam partisipasinya untuk penguatan ekonomi kerakyatan membantu 5 pasang bibit babi atau kucit yang diserahkan oleh Kepala Cabang BPD Singaraja IB Ari Suryantara

Wagub Sudikerta juga turun langsung ikut meterap (pasang batako) untuk tembok rumah, bersama sejumlah pimpinan SKPD lingkup Pemprov Bali. Wagub Sudikerta terlihat seperti sudah biasa menterap. @ **k19**

: Kamis, 10 September 2015 Edisi

Hal

NUSSB 315



Puskesmas Terpaksa Beli Air dari Pedagang Keliling

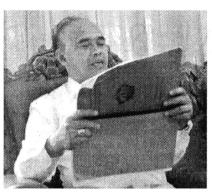
BANGLI, NusaBali

Lantaran belum
terjangkau
oleh pelayanan PDAM,
sejumlah
pusat kesehatan masyarakat di
Bangli kesulitan memperoleh
pasokan
air bersih. Untuk

memenuhi kebutuhan air, mereka terpaksa membeli air dari pedagang keliling. Hal ini cukup merepotkan karena semakin menambah banyak pengeluaran anggaran dari pihak puskesmas.

Kepala Dinas kesehatan Bangli dr I Nengah Nadi, saat dikonfirmasi, tidak menampik relita itu. Dikatakan, belakangan ini 3 puskesmas memang belum memiliki sumber air, maka mereka mesti membeli air dari pedagang keliling. "Memang ada sejumlah Pusekemas yang belum memiliki sumber air, salah satunya adalah Puskesmas Kintamani 3, di Desa Belantih," ujarnya, Rabu (9/9).

Dengan membeli air tentunya, bakal menyebabkan pengeluaran tiga puskesamas itu akan membengkak. Pasalnya harga dari pedagang air keliling ini, lebih mahal. Dia lantas mencontohkan dalam satu triwulan saja (tiga bulan) di Puskesmas Kintamani



• NUSABALI/DEWA KADISKES Bangli I Nengah Nadi

3 anggaran untuk membeliair mencapai Rp 1 juta, setidaknya menghabiskan sebanyak 4 Mobil Tanki.

Puskesmas Kintamani 3, merupakan puskesmas yang melayani

rawat inap, apabila dilihat lagi pasien yang datang berobat atau rawat inap memang lumayan tinggi. Pasien tidak saja dari Bangli, namun juga berasal dari luar daerah, seperti dari Singaraja. Tentu aktivitas yang cukup tinggi itu harus didukung dengan ketersediaan air yang mencukupi.

Sedangkan salah satu puskesmas yang menggunakan air PDAM, yakni Puskesmas Tembuku dalam satu triwulan tagihan rekeningnya hanya sebesar Rp 450.000.

"Untuk perbandingan biaya yang dihabiskan hampir mencapai dua kali lipat,"paparnya.

Sementara, mengenai ketersediaan tenaga dokter, sebut Nadi, seluruh Puskesmas yang tersebar di empat kecamatan semuanya sudah dilengkapi dengan tenaga dokter.

"Dulu ada beberapa pukesmas tidak ada dokternya, namun sekarang semua puskesmas telah ada dokternya, "ujarnya. (m) cr53

Edisi : Kamis, 10 september 2015

Hal : <u>8</u>